

Bisakah Gencatan Senjata AS-Iran Bertahan? Sebuah Refleksi Geopolitik di Tengah Ketidakpastian Strategis

suryawiranto.id

Dunia bernapas lega sejenak. Pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran menghentikan eskalasi yang sempat mengancam meledak menjadi konflik regional berskala penuh. Namun, di balik optimisme sementara itu, pertanyaan mendasar yang jauh lebih strategis harus diajukan: akankah kesepakatan ini bertahan, ataukah sekadar jeda taktis dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih dalam dan tidak dapat didamaikan?

Analisis realpolitik menunjukkan dua rintangan struktural yang belum terselesaikan. **Pertama**, Israel terus melancarkan kampanye militer di Lebanon terhadap Hizbullah, serangan terbaru menewaskan sedikitnya 182 orang dan melukai ratusan lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sekaligus mengakibatkan pengungsian lebih dari satu juta jiwa. Baik Presiden Donald Trump maupun Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi sama sekali tidak menyebut Lebanon dalam pernyataan malam itu. Israel pun secara tegas menyatakan negara itu berada di luar ruang lingkup gencatan senjata. Ironi tajam muncul ketika Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang berperan penting memediasi, secara eksplisit menyertakan Lebanon dalam pengumumanannya. Ketidakselarasan ini bukan sekadar masalah prosedural; ia mengungkapkan jurang kepercayaan yang menganga dan potensi proxy war yang masih menyala.

Kedua, nasib Selat Hormuz, arteri utama pasokan energi global, masih diselimuti kabut strategis. Selat tersebut dilaporkan belum sepenuhnya terbuka. Iran sebelumnya menerapkan skema tol sebesar dua juta dolar AS per kapal sambil tetap mengekspor minyaknya sendiri. Kini Teheran menjamin "*jalur aman*" bagi kapal yang berkoordinasi dengan militernya, tetapi nasib tol tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Lebih mengejutkan lagi, Trump justru mengusulkan partisipasi Amerika Serikat dalam skema tol itu sebagai "*usaha patungan*". Dalam perspektif *grand strategy*, hal ini bukan kemenangan diplomasi, melainkan pengakuan tersirat bahwa Washington terpaksa bernegosiasi dengan aktor yang selama ini dicap sebagai ancaman eksistensial.

Para analis senior telah menyoroti kekosongan detail yang mencolok. Brett McGurk, mantan utusan Gedung Putih, dan Danny Citrinowicz dari Institute for National Security Studies Universitas Tel Aviv, secara independen menyatakan bahwa kesepakatan ini harus diperlakukan dengan kehati-hatian ekstrem. Citrinowicz menegaskan: "*Kepercayaan yang rapuh antarpihak menuntut kita melihat ini bukan sebagai akhir pertempuran, melainkan awal dari fase yang jauh lebih rumit.*" Trump menyebut proposal damai sepuluh poin Iran sebagai "*basis yang workable*" untuk kesepakatan jangka panjang. Padahal proposal itu mencakup kelanjutan pengayaan uranium Iran, tuntutan reparasi perang dari AS, pencabutan sanksi, serta skema tol Iran-Oman di Hormuz. Jika diterima utuh, ini bukan kompromi, melainkan kemenangan strategis historis bagi Teheran, sebagaimana dicatat Frida Ghitis dan The Economist. Washington, yang semula mengklaim superioritas, kini tampak memilih realisme pragmatis di atas doktrin "*maximum pressure*" yang dulu diagungkan.

Pembicaraan damai yang dijadwalkan mulai Jumat di Islamabad berpotensi berujung pada *impasse* yang sama seperti sebelum perang Februari lalu. Posisi kedua pihak masih berjarak sangat jauh. Ini bukan kegagalan teknis, melainkan cerminan kegagalan struktural tatanan internasional pasca-perang dingin: ketika kekuatan adidaya terpaksa bernegosiasi dengan negara yang dianggap “*rogue*”, legitimasi hegemoni pun terkikis.

Implikasi Strategis bagi Indonesia: Dari Ancaman Ekonomi hingga Peluang Diplomatik

Bagi Indonesia, dampak geopolitik ini bukanlah isu jauh di Timur Tengah, melainkan ancaman langsung terhadap kepentingan nasional. Sebagai importir net minyak terbesar di Asia Tenggara, setiap gangguan di Selat Hormuz langsung memicu lonjakan harga energi global. Inflasi domestik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sedang gencar membangun infrastruktur dan transisi energi akan menjadi konsekuensi tak terhindarkan. Lebih strategis lagi, ketidakpastian ini memperlemah posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok energi Indo-Pasifik dan memperbesar kerentanan terhadap *shock* eksternal.

Namun, di balik risiko terdapat peluang implementasi kebijakan yang visioner. Jakarta harus segera mempercepat diversifikasi sumber energi, memperkuat cadangan strategis minyak, mempercepat pengembangan *renewable energy*, dan memperdalam kemitraan dengan produsen non-Tradisional seperti Australia dan negara-negara Teluk yang netral. Secara diplomatik, sebagai negara Muslim terbesar dunia dan anggota G20, Indonesia memiliki legitimasi moral dan politik untuk tidak sekadar menjadi penonton. Melalui platform OKI, ASEAN, atau forum multilateral lainnya, Jakarta dapat mendorong inklusivitas Lebanon dalam setiap kesepakatan damai, sekaligus menawarkan diri sebagai mediator netral yang kredibel, sebuah peran yang selaras dengan tradisi bebas-aktif yang kini harus dijalankan dengan kecerdasan strategis di era multipolar.

Pada akhirnya, gencatan senjata ini mengingatkan kita pada pelajaran klasik Machiavelli sekaligus teori *deterrence* modern: perdamaian yang rapuh tanpa resolusi akar konflik hanyalah penundaan perang berikutnya. Bagi Indonesia, saatnya berpikir bukan sekadar reaktif, melainkan proaktif, mengubah ancaman geopolitik menjadi katalisator bagi ketahanan nasional dan kepemimpinan regional yang substantif. Karena dalam dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, yang paling berbahaya bukanlah konflik itu sendiri, melainkan ketidaksiapan menghadapinya.

Bisakah Gencatan Senjata AS-Iran Bertahan?

Sebuah Refleksi Geopolitik di Tengah Ketidakpastian Strategis



Dunia bernapas lega sesaat, saat AS dan Iran mengumumkan gencatan senjata. Namun, pertanyaan strategis tetap menggantung: apakah kesepakatan ini bertahan, ataukah sekadar jeda taktis di tengah ketidakpercayaan mendalam? Israel terus menyerang Lebanon di luar ruang lingkup gencatan senjata, menewaskan ratusan jiwa, sementara nasib Selat Hormuz, arteri energi global masih kabur, dengan skema tol Iran yang berpotensi melibatkan AS. Proposal damai Teheran yang diterima Trump sebagai “*basis workable*” justru berisiko menjadi kemenangan historis bagi Iran,

termasuk kelanjutan pengayaan uranium dan pencabutan sanksi. Bagi Indonesia, gejolak ini mengancam stabilitas harga energi, rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Jakarta harus mempercepat diversifikasi energi serta memainkan peran diplomatik aktif sebagai negara Muslim terbesar untuk mendorong perdamaian inklusif. Dalam era multipolar, ketidaksiapan adalah ancaman terbesar.

suryawiranto.id